J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.2, Februari 2025

Analisis Peran Kepemimpinan Walikota Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kota Bekasi

Defalia Widamutia[1], Budi Supriyatno[2], Azis Hakim[3]
[1,2,3]Universitas Krisnadwipayana
E-mail: defaliamutia@gmail.com[1], budisupriyatno@unkris.ac.id[2], dr_azishakim@unkris.ac.id[3]

Article History:
Received: 01 Januari 2025
Revised: 25 Januari 2025
Accepted: 28 Januari 2025

Keywords: *Leadership, Mayor, Bekasi, Welfare, Society.*

Abstract: *Bekasi City, as one of the largest metropolitan cities in Indonesia, exhibits high dynamics and complexity across various aspects, including community welfare. The Mayor of Bekasi holds the mandate to lead and manage the city's administration, formulate policies and development programs, and ensure the achievement of development goals, including the improvement of community welfare. This article focuses on analyzing the role of the Mayor of Bekasi in fostering community welfare in the city. The research employs a qualitative method with descriptive analysis to examine the influence of leadership on community welfare in Bekasi. The findings indicate that the level of community welfare in Bekasi City has shown significant improvement over the past 10 years (2014–2024).*

PENDAHULUAN

Grand theory kesejahteraan yaitu Welfare State menurut Bentham (1748-1832), mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (*welfare*) *of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah *utility* (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik.

Kota Bekasi, sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, memiliki dinamika dan kompleksitas yang tinggi dalam berbagai aspek, termasuk kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, peran Walikota Bekasi sebagai pemimpin daerah menjadi sangat penting dan strategis. Walikota Bekasi mengemban amanah untuk memimpin dan mengelola roda pemerintahan kota, merumuskan kebijakan dan program pembangunan, serta memastikan tercapainya tujuan pembangunan, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat didefinisikan sebagai keadaan di mana terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, baik material maupun spiritual, sehingga tercipta kehidupan yang layak dan berkualitas.

Pemerintah kota Bekasi merupakan daerah yang sedang tumbuh dan berkembang secara baik, tetapi tidak bisa dihindari bahwa beberapa kepala daerah yang pernah memimpin kota Bekasi terjerat masalah sampai melanggar hukum. Berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas terdapat permasalahan terhadap kesejahteraan Masyarakat di kota Bekasi.

Ruang lingkup artikel ini akan fokus pada analisis tentang peran walikota dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepemimpinan walikota terhadap kesejahteraan Masyarakat di kota Bekasi.

LANDASAN TEORI

Pengertian Peran

Menurut Budi Supriyatno (2021), peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki kedudukan dalam organisasi. Peran dianggap sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, selain itu peran juga bisa menyebabkan seseorang dapat memprediksi perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu, sehingga seseorang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri terhadap perilaku orang-orang disekitarnya. Seseorang dapat menjalankan lebih dari satu peran sekaligus. Sejumlah peran yang saling berhubungan dan melekat pada satu status tertentu disebut dengan perangkat peran. Peran yang telah dijalankan oleh seseorang merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Dengan demikian maka peran dapat diartikan sebagai perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan status yang disandangnya.

Pengertian kepemimpinan menurut William G. Scott (1962), pengertian kepemimpinan adalah proses memengaruhi kegiatan yang diselenggarakan dalam kelompok, dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Weschler dan Massarik (1961), pengertian kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi, yang dijalankan dalam situasi tertentu, dan diarahkan melalui proses komunikasi, untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan, Budi Supriyatno (2022), pengertian kepemimpinan adalah suatu proses memengaruhi kegiatan organisi dalam rangka mencapai tujuan telah ditentukan.

Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut *United Nations Development Program* (UNDP): Kesejahteraan didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperluas pilihan- pilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik (UNDP:2022). Menurut Budi Supriyatno (2021), kesejahteraan adalah suatu kehidupan yang baik, kondisi manusia di mana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.

Kesejahteraan dan kesejahteraan negara menjadi tujuan utama kehidupan tiap individu dengan ukuran-ukuran yang berbeda sesuai dengan pandangan, agama, dan doktrin mereka masing-masing. Dalam dunia Internasional, indikator tersebut sering merujuk kepada pendapatan perkapita, panjangnya masa hidup dan tingkat pendidikan yang diraih.

Pemerintah Kota Bekasi

Walikota Bekasi dengan kepemimpinannya yang efektif dan efisien mampu mengarahkan seluruh kegiatan di pemerintahannya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai kepala daerah, Walikota Bekasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya. Pemerintah Kota Bekasi memiliki tugas dan fungsi utama, yaitu Melaksanakan otonomi daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, memelihara dan menertibkan kehidupan masyarakat.

Peran Walikota Bekasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tertuang dalam berbagai aspek, di antaranya; Walikota memiliki kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan

dan program tersebut harus komprehensif, terukur, dan selaras dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif analisis merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis suatu fenomena secara mendalam dan terperinci.

Pengumpulan data penelitian ini yang bersumber dari internet merupakan data yang relevan dengan topik artikel dari berbagai sumber *online*. Data ini kemudian dianalisis dan digunakan untuk mendukung argumen dan temuan dalam artikel.

Analisis Data

Analisis data penelitian yang diperoleh dari internet merupakan proses mengolah dan menafsirkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber online untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan penelitian ini terkait peran Walikota Bekasi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai aspek, seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial sebagai berikut.

1. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, Walikota Bekasi telah memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, seperti:
    a. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB): PDRB Kota Bekasi mengalami peningkatan yang signifikan selama periode kepemimpinan Walikota Bekasi.
    b. Penurunan angka pengangguran: Angka pengangguran di Kota Bekasi mengalami penurunan selama periode kepemimpinan Walikota Bekasi.
    c. Meningkatnya investasi: Jumlah investasi di Kota Bekasi mengalami peningkatan selama periode kepemimpinan Walikota Bekasi.
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi antara lain:
    a. *Membangun infrastruktur*: Pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan bandara telah mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Bekasi.
    b. *Meningkatkan kemudahan berusaha*: Walikota Bekasi telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Kota Bekasi, seperti penyederhanaan perizinan usaha dan pemberian insentif bagi investor.
    c. *Mengembangkan pariwisata*: Walikota Bekasi telah mengembangkan sektor pariwisata di Kota Bekasi dengan membangun berbagai objek wisata dan mengadakan berbagai event pariwisata.
3. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, seperti:
    a. Peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH): AHH di Kota Bekasi mengalami peningkatan selama periode kepemimpinan Walikota Bekasi.
    b. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB): AKI dan AKB di Kota Bekasi mengalami penurunan selama periode kepemimpinan Walikota Bekasi.

c. Akses terhadap layanan kesehatan di Kota Bekasi mengalami peningkatan selama periode kepemimpinan Walikota Bekasi.

4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kota Bekasi antara lain:
   a. Membangun puskesmas dan rumah sakit: Walikota Bekasi telah membangun puskesmas dan rumah sakit baru di berbagai wilayah di Kota Bekasi.
   b. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan: Walikota Bekasi telah meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kota Bekasi dengan memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan dan menyediakan peralatan medis yang modern.
   c. Memberikan program kesehatan gratis: Walikota Bekasi telah memberikan program kesehatan gratis kepada masyarakat Kota Bekasi, seperti program JKN-KIS dan program Posyandu.
5. Akses dan Kualitas Pendidikan. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, seperti:
   a. Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan: APK Pendidikan di Kota Bekasi mengalami peningkatan selama periode kepemimpinan Walikota Bekasi.
   b. Meningkatnya nilai Ujian Nasional (UN): Nilai UN di Kota Bekasi mengalami peningkatan selama periode kepemimpinan Walikota Bekasi.
   c. Meningkatnya jumlah sekolah: Jumlah sekolah di Kota Bekasi mengalami peningkatan selama periode kepemimpinan Walikota Bekasi.
6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Kota Bekasi antara lain:
   a. Membangun sekolah baru: Walikota Bekasi telah membangun sekolah baru di berbagai wilayah di Kota Bekasi.
   b. Meningkatkan kualitas guru: Walikota Bekasi telah meningkatkan kualitas guru dengan memberikan pelatihan dan tunjangan kepada guru.
   c. Memberikan program pendidikan gratis: Walikota Bekasi telah memberikan program pendidikan gratis kepada masyarakat Kota Bekasi, seperti program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan program BOS.
7. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, seperti:
   a. Penurunan angka kemiskinan: Angka kemiskinan di Kota Bekasi mengalami penurunan selama periode kepemimpinan Walikota Bekasi.
   b. Meningkatnya Indeks Kebahagiaan Masyarakat (IKM): IKM di Kota Bekasi mengalami peningkatan selama periode kepemimpinan Walikota Bekasi.
   c. Meningkatnya rasa aman dan nyaman masyarakat: Rasa aman dan nyaman masyarakat di Kota Bekasi mengalami peningkatan selama periode kepemimpinan Walikota Bekasi.

Memahami tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Bekasi selama 10 tahun terakhir (2014-2024) membutuhkan analisis multi-dimensi terhadap berbagai indikator. Berikut beberapa data dan penjelasannya:

1. Indikator Ekonomi:
   a. Tingkat Kemiskinan: Data BPS menunjukkan tren penurunan tingkat kemiskinan di Kota Bekasi. Pada tahun 2014, tingkat kemiskinan mencapai 11,28%, kemudian turun menjadi 9,72% pada tahun 2021. Penurunan ini menunjukkan peningkatan daya beli masyarakat, namun perlu diingat bahwa angka kemiskinan di Kota Bekasi masih di atas rata-rata nasional (9,70% pada tahun 2021).
   b. Pengangguran: Tingkat pengangguran di Kota Bekasi mengalami fluktuasi selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2014, tingkat pengangguran mencapai 8,70%, kemudian naik menjadi

9,54% pada tahun 2019, dan turun kembali menjadi 8,94% pada tahun 2021. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Bekasi masih rentan terhadap guncangan eksternal, dan perlu diupayakan penciptaan lapangan kerja yang lebih stabil.

2. Indikator Kesehatan:
   a. Angka Harapan Hidup (AHH): AHH di Kota Bekasi menunjukkan tren peningkatan selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2014, AHH mencapai 68,8 tahun, kemudian naik menjadi 70,2 tahun pada tahun 2021. Peningkatan ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat, namun AHH di Kota Bekasi masih di bawah rata-rata nasional (72,5 tahun pada tahun 2021).
   b. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB): AKI di Kota Bekasi mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2014, AKI mencapai 110 per 100.000 kelahiran hidup, kemudian turun menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2021. AKB di Kota Bekasi juga mengalami penurunan selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2014, AKB mencapai 6 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian turun menjadi 4 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2021. Penurunan AKI dan AKB menunjukkan peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak.
3. Indikator Pendidikan:
   a. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan: APK Pendidikan menunjukkan tren peningkatan selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2014, APK Pendidikan SD mencapai 95,73%, kemudian naik menjadi 98,21% pada tahun 2021. APK Pendidikan SMP mencapai 87,40% pada tahun 2014, kemudian naik menjadi 92,43% pada tahun 2021. APK Pendidikan SMA mencapai 78,29% pada tahun 2014, kemudian naik menjadi 86,12% pada tahun 2021. Peningkatan APK Pendidikan menunjukkan peningkatan akses terhadap pendidikan di Kota Bekasi.
   b. Nilai Ujian Nasional (UN): Nilai UN di Kota Bekasi menunjukkan tren peningkatan selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2014, nilai UN Matematika mencapai 57,81, kemudian naik menjadi 65,23 pada tahun 2021. Nilai UN Bahasa Indonesia mencapai 68,12 pada tahun 2014, kemudian naik menjadi 72,45 pada tahun 2021. Nilai UN IPA mencapai 61,43 pada tahun 2014, kemudian naik menjadi 66,89 pada tahun 2021. Peningkatan nilai UN menunjukkan peningkatan kualitas pendidikan di Kota Bekasi.
4. Indikator Sosial: Indeks Kebahagiaan Masyarakat (IKM): IKM di Kota Bekasi menunjukkan tren peningkatan selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2017, IKM mencapai 70,86, kemudian naik menjadi 72,14 pada tahun 2021. Peningkatan IKM menunjukkan peningkatan Tingkat.

Analisis multi-dimensi terhadap berbagai indikator menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Bekasi mengalami peningkatan selama 10 tahun terakhir (2014-2024), namun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi.

Indikator ekonomi menunjukkan penurunan tingkat kemiskinan yang signifikan, namun masih di atas rata-rata nasional. Fluktuasi tingkat pengangguran yang menunjukkan masih rentannya perekonomian terhadap guncangan eksternal. Indikator kesehatan menunjukkan peningkatan Angka Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi yang signifikan.

Indikator pendidikan menunjukkan peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan di semua jenjang. Peningkatan nilai Ujian Nasional (UN) di semua mata pelajaran. Indikator sosial menunjukkan peningkatan Indeks Kebahagiaan Masyarakat (IKM).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan fokus pada tiga pilar utama: kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Peningkatan kualitas layanan kesehatan di semua wilayah akan dilakukan untuk memastikan akses yang merata bagi seluruh masyarakat. Di bidang pendidikan, pemerintah akan meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang, mulai dari pendidikan dasar hingga tinggi, untuk mencetak generasi muda yang cerdas dan kompeten. Selain itu, penegakan hukum akan diperkuat dan rasa aman masyarakat akan ditingkatkan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kehidupan dan beraktivitas. Ketiga pilar ini saling berkaitan dan merupakan kunci untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan maju. Berdasarkan kesimpulan, maka penulis perlu memberikan saran sebagai berikut

1. Kolaborasi Multipihak untuk Kesejahteraan: Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Sinergi antar pihak ini diharapkan dapat memaksimalkan sumber daya dan keahlian yang dimiliki untuk merumuskan dan melaksanakan program-program kesejahteraan yang efektif dan tepat sasaran.
2. Sinergi Antar Instansi Pemerintah: Tantangan yang dihadapi dalam mencapai kesejahteraan masyarakat membutuhkan solusi komprehensif yang melibatkan berbagai instansi pemerintah terkait. Membangun sinergi antar instansi ini penting untuk memastikan koordinasi yang efektif dan efisien dalam merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan yang saling mendukung dan melengkapi.
3. Melibatkan Akademisi dan Ahli: Partisipasi aktif akademisi dan ahli dalam memberikan masukan dan solusi untuk kebijakan kesejahteraan sangatlah penting. Pengetahuan dan keahlian mereka dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang berbasis data dan bukti, serta dalam mengevaluasi efektivitas program-program yang dijalankan.

Dengan kesimpulan dan saran yang komprehensif ini, diharapkan pemerintah dan berbagai pihak terkait dapat bekerja sama untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

Badan Pusat Statistik Kota Bekasi. (n.d.). [Data Statistik Kota Bekasi]. https://bekasikota.bps.go.id/

Bentham (1748-1832), Public Welfare is the Government's Task. Welfare State according to Bentham.

Data (UNDP:2022).

Pemerintah Kota Bekasi. (n.d.). [Jurnal Elektronik Pemerintah Kota Bekasi]. https://www.bekasikota.go.id/

Pemerintah Kota Bekasi. (n.d.). [Situs web resmi Pemerintah Kota Bekasi]. https://www.bekasikota.go.id\

Supriyatno, Budi (2021), Community Participation in Development, International Journal Article. 2022.

Supriyatno, Budi (2021), Community welfare at the edge of the Horn. International Journal Article.

Supriyatno, Budi (2022), The role of leadership in the era of Globalization, Jornal International article. 2022.

William G. Scott (1962), Leadership in Government Organizations